

TATA CARA PEMBERIAN - PERTANGGUNGJAWABAN – BKK-KAMPUNG-RT

2026

PERBUP MAHAKAM ULU NO. 3 (BD TAHUN 2026 NO. 03), 45 HLM.

Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Kampung Berbasis Rukun Tetangga

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pengaturan tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kampung berbasis rukun tetangga di Kabupaten Mahakam Ulu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kampung Berbasis Rukun Tetangga.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No.2 Tahun 2013; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2025 Pengganti; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.11 Tahun 2019; Perpres No. 99 Tahun 2017; Permendagri No.20 Tahun 2018; Permendagri No.36 Tahun 2020; Perbup Mahakam Ulu No. 4 Tahun 2019; Perbup Mahakam Ulu No. 14 Tahun 2020.
 - Tentang tata cara perencanaan, pelaksanaan dan penyaluran dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari pemerintah daerah kepada pemerintah kampung berbasis rukun tetangga (RT) yang meliputi bidang pembangunan kampung, bidang pemberdayaan masyarakat kampung, pembentukan dan kegiatan dasawisma. Pengalokasian besaran BKK setiap RT diberikan paling besar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), besaran biaya BKK yang dialokasikan untuk kegiatan kelompok dasawisma paling sedikit Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan paling besar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per tahun. Pelaporan dan pertanggungjawaban wajib dilaporkan dalam bentuk surat pertanggungjawaban dengan pembinaan dan pengawasan melalui perangkat daerah.
- Catatan :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 April 2026.